

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang)

¹Mohamad Nurpahdi, ²Agung Edi Rustanto, ³Harits Hijrah Wicaksana, ⁴Muhammad Cholifihani
^{1,2,3,4}Universitas Esa Unggul

Korespondensi : nurpahdi@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan ekstrem adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses ke informasi. Untuk menangani kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat dan daerah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk di Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di Kabupaten Karawang dan menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang. Lima desa termasuk dalam subjeknya, dan enam belas informan dilibatkan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, subsidi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar adalah cara implementasi kebijakan dilakukan. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah data penerima manfaat yang tidak akurat, kurangnya koordinasi antar OPD, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman pelaksana tentang substansi kebijakan. Sebaliknya, hal-hal yang mendukung termasuk komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas sektor melalui forum TKPKD, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Singkatnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang bergantung pada optimalisasi data, koordinasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pelaksana.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan Ekstrem.

Abstract

Extreme poverty is when a person is unable to meet their basic needs, such as food, clean water, adequate sanitation, health services, shelter, education, and access to information. To address extreme poverty, the central and local governments have developed various programs and policies. However, implementation in the field still faces various obstacles, including in Karawang Regency. The purpose of this study was to see how the extreme poverty alleviation policy is implemented in Karawang Regency and to find factors that support and hinder its implementation. This study used a qualitative methodology, which collected data through observation, in-depth interviews, and documentation. This study focused on the Regional Development Planning Agency of Karawang Regency. Five villages were included in the subjects, and sixteen informants were involved. Data analysis used the Miles and Huberman model, which includes presentation, drawing conclusions, and data reduction. The results of the study showed that social assistance programs, skills training, education subsidies, and basic infrastructure development are ways of implementing the policy. However, its implementation in the field has not been optimal. One of the inhibiting factors found was inaccurate beneficiary data, lack of coordination between OPDs, limited budget and human resources, and lack of understanding of the implementers of the substance of the policy. On the other hand, supporting factors include the commitment of regional leaders, cross-sector synergy through the TKPKD forum, and active community participation. In short, the success of the extreme poverty alleviation program in Karawang Regency depends on data optimization, institutional coordination, and increasing the capacity of implementers.

Keyword: Implementation, Policy, Extreme Poverty.

1. PENDAHULUAN

Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling kompleks. Tidak hanya masalah ekonomi, kemiskinan mencakup aspek sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kemiskinan ekstrem adalah salah satu jenis kemiskinan yang paling parah dan memerlukan perhatian khusus. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan informasi, disebut kemiskinan ekstrem. Menurut standar internasional yang ditetapkan oleh PBB, seseorang dianggap miskin ekstrem apabila pengeluarannya di bawah US\$1,9 per hari berdasarkan nilai Purchasing Power Parity, yang setara dengan sekitar Rp45.000 per hari di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang, atau sekitar 9,03% dari total populasi, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2024. Keberadaan kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar, meskipun angka kemiskinan umumnya menunjukkan tren penurunan. Kelompok ini tinggal di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, yang memiliki populasi terbanyak. Kabupaten Karawang adalah salah satu daerah di Jawa Barat yang masih mengalami kemiskinan ekstrem. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 adalah 0,75%, atau sekitar 17.890 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun telah dilakukan banyak upaya untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah mengembangkan dan menerapkan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, bantuan pangan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, dalam kehidupan nyata, program-program tersebut masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk data penerima manfaat yang tidak akurat, sasaran bantuan yang tidak tepat, koordinasi yang buruk antar instansi, dan kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Di tingkat implementasi, ada juga fenomena birokrasi level bawah, juga dikenal sebagai birokrasi jalan, yang menyebabkan pelaksana program di lapangan memiliki kebebasan yang berlebihan. Pada akhirnya, ini menyebabkan distribusi bantuan yang tidak adil dan pelaksanaan program yang tidak tepat.

Sebagai alat untuk mengukur sosial ekonomi rumah tangga, desil kesejahteraan menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Karawang, termasuk Kecamatan Karawang Barat, Pedes, Kota Baru, Cilamaya Kulon, dan Batujaya, serta Desa Rengasdengklok Selatan, Sungaibuntu, Pucung, Kosambibatu, dan Tanjung Mekar, masih termasuk dalam kelompok desil 1 atau 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di seluruh negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya ada di daerah terpencil tetapi juga di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan daerah. Agar program pengentasan kemiskinan di daerah ini lebih efektif dan berkelanjutan, kondisi sosial ekonomi lokal, kemampuan institusi pelaksana, dan partisipasi masyarakat harus dipertimbangkan.

Penelitian tentang bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut efektif di lapangan. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), digunakan dalam penelitian ini. Menurut model ini, ada enam faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, jumlah sumber daya yang tersedia, sifat agen pelaksana, sikap dan kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang, keenam

variabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari berbagai dinamika dan kesulitan yang terkait dengan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya. Misalnya, penelitian oleh Yunusa (2012) dan Rakhmat (2015) menunjukkan bahwa masalah pada tahap implementasi program pengentasan kemiskinan menyebabkan kegagalan program di banyak tempat. Masalah-masalah ini termasuk sasaran yang tidak tepat untuk bantuan, mekanisme pengawasan yang tidak efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, Wisnutama et al. (2023) menyatakan bahwa akurasi data sangat penting untuk menentukan kelompok sasaran program. Tanpa data yang akurat, kebijakan cenderung melenceng dari tujuan dan tidak mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk membuat rencana jangka panjang berdasarkan tiga strategi utama: mengurangi pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Untuk melaksanakannya, diperlukan kerja sama antarsektor dan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Data P3KE, hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan desil dan persentil.

Penelitian ini penting dilakukan karena masalahnya kompleks dan upaya yang telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang diterapkan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Dalam penelitian ini, lima desa yang termasuk dalam kategori desil 1 digambarkan sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan terendah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang kebijakan publik, khususnya dalam hal implementasi kebijakan sosial. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat membantu evaluasi dan memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan sistem bantuan sosial, meningkatkan keakuratan data, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kerja sama antarinstansi.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di Kabupaten Karawang dan menemukan faktor-faktor apa saja yang menghambat atau membantu implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat daerah dan mendorong pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih sesuai dengan situasi lokal.

2. METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem diterapkan di lima desa di Kabupaten Karawang, khususnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial secara menyeluruh, terutama ketika peneliti ingin memahami makna, persepsi, pengalaman, dan interaksi sosial dari para pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan di tingkat akar rumput yang tidak selalu tercermin dalam data kuantitatif.

Studi ini dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, yang berfungsi sebagai lembaga pengarah kebijakan utama, dan lima desa sasaran: Desa Rengasdengklok

Selatan, Desa Sungaibuntu, Desa Pucung, Desa Kosambi Batu, dan Desa Tanjung Mekar. Kriteria wilayah dengan tingkat kesejahteraan terendah digunakan untuk memilih kelima desa tersebut (Desil 1), yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem masih tinggi.

Tiga metode utama digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, di mana peneliti hadir langsung di lokasi kegiatan implementasi kebijakan untuk melihat bagaimana program dijalankan, bagaimana para pelaksana berinteraksi, dan bagaimana masyarakat menanggapi program. Disebabkan fakta bahwa observasi ini dilakukan tanpa keterlibatan aktif peneliti dalam proses kegiatan, hasilnya tidak berdampak pada bagaimana program berjalan. Dilakukan wawancara mendalam secara tatap muka dengan informan penting, termasuk pejabat dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pejabat Bappeda, Meninjau berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang, seperti Peraturan Bupati, laporan tahunan Bappeda, perencanaan program, dan data pendukung dari Dinas Sosial, serta hasil musrenbang desa, digunakan sebagai metode dokumentasi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Analisis dokumen ini meningkatkan kredibilitas hasil lapangan dan memberikan konteks untuk penerapan kebijakan.

Penelitian menggunakan peralatan yang cukup sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Peralatan utama yang digunakan meliputi alat pencatat suara (voice recorder) untuk merekam wawancara, kamera atau ponsel pintar untuk dokumentasi visual, laptop untuk transkripsi dan analisis data, serta perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet untuk menyusun data. Selain itu, buku catatan lapangan digunakan untuk mencatat hasil observasi dan refleksi peneliti selama kegiatan berlangsung. dan anggota masyarakat dan penerima manfaat program. Penelitian ini memiliki informan total 16 orang, terdiri dari lima pejabat Bappeda, satu anggota TKPKD, dan sepuluh warga dari masing-masing desa yang dimaksud. Untuk memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan perspektif mereka, wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur.

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap utama. Pertama, studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Kemudian, lokasi dan informan diidentifikasi berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Terakhir, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Keempat, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Validitas data dijamin melalui triangulasi metode dan sumber, dan member checking kepada informan. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan diterapkan secara menyeluruh dan membantu dalam pembuatan rencana pengentasan kemiskinan ekstrem yang lebih efisien di tingkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lima desa di Kabupaten Karawang, yaitu Desa Rengasdengklok Selatan, Sungaibuntu, Pucung, Kosambi Batu, dan Tanjung Mekar. Pemilihan desa ini didasarkan pada klasifikasi desil 1 dan 2 dari DTKS dan P3KE yang menunjukkan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Wilayah ini secara geografis terletak di kawasan pesisir dan pertanian dengan keterbatasan infrastruktur dasar serta layanan sosial yang belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Sebagian besar orang di wilayah penelitian bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, nelayan, dan pedagang kecil. Bergantung pada musim dan permintaan pasar, pendapatan yang diperoleh tidak dapat diprediksi. Masyarakat sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki jaminan sosial dan pendidikan

yang cukup. Keterbatasan transportasi dan jarak dari pusat layanan publik kabupaten memperparah kondisi ini.

Meskipun Karawang adalah daerah industri, ada perbedaan yang jelas antara pusat kota dan desa-desa pinggiran. Pemerataan pembangunan masih belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam hal pembangunan fasilitas umum dan peningkatan ekonomi lokal. Desa-desa tempat penelitian belum banyak terkena dampak dari investasi dan program pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.1 menunjukkan estimasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan data P3KE dan proporsi desil rendah. Hasil menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin ekstrem berkisar antara 9,8% dan 12,5% dari total penduduk desa. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah ini masih merupakan kantong kemiskinan yang membutuhkan perhatian khusus.

Tabel 4.1 Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan di Lokasi Penelitian

Desa	Persentase Desil 1–2 (%)	Penduduk Miskin Ekstrem (Estimasi)
Rengasdengklok Selatan	11,20%	1.785 jiwa
Sungaibuntu	10,70%	1.610 jiwa
Pucung	9,80%	1.420 jiwa
Kosambi Batu	12,50%	1.950 jiwa

Sumber: Diolah dari Data P3KE dan DTKS Kabupaten Karawang (BAPPEDA Karawang, 2024)

Data menunjukkan bahwa kelima desa memiliki masalah kesejahteraan yang serupa dan merupakan prioritas dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan dapat berkonsentrasi pada hambatan dan peluang yang dihadapi secara khusus di tingkat desa berdasarkan pemetaan ini. Data menunjukkan bahwa kelima desa memiliki masalah kesejahteraan yang serupa dan merupakan prioritas dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan dapat berkonsentrasi pada hambatan dan peluang yang dihadapi secara khusus di tingkat desa berdasarkan pemetaan ini.

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

PKH, bantuan pangan nontunai, subsidi pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja adalah beberapa program nasional yang telah diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappeda dan forum TKPKD memastikan pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, masing-masing perangkat daerah bertanggung jawab untuk menerapkan program.

Namun, banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketidaktepatan data penerima bantuan merupakan masalah utama. Data penerima menunjukkan masyarakat yang secara ekonomi tidak tergolong miskin ekstrem, tetapi tidak menunjukkan kelompok rentan yang sangat membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi dan pemutakhiran data di tingkat desa kurang efektif.

Ketidakpuasan masyarakat meningkat dan persepsi buruk terhadap program pemerintah muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian data. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana menyebabkan distribusi bantuan tertunda di beberapa desa. Akibatnya, manfaat program tidak maksimal dan tidak merata.

Selain itu, pelaksana kebijakan di tingkat desa menghadapi kesulitan untuk memahami substansi dan mekanisme yang digunakan oleh kebijakan. Banyak perangkat desa hanya melakukan tugas administratif

tanpa memahami tujuan program. Program secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik karena kekurangan kemampuan ini.

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah keluhan dan penerima bantuan terkait ketidaktepatan data. Data menunjukkan bahwa sekitar 20–30 persen masyarakat di setiap desa merasa tidak mendapatkan bantuan, meskipun mereka dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh mekanisme penyaluran bantuan diperlukan.

Tabel 4.2 Realisasi Bantuan dan Keluhan Tidak Terdata

Desa	Jumlah Penerima PKH	Keluhan Tidak Terdata (%)
Rengasdengklok Selatan	642	24%
Sungaibuntu	590	28%
Pucung	510	19%
Kosambi Batu	680	30%
Tanjung Mekar	600	25%

Sumber: Diolah dari Laporan Penyaluran Bantuan PKH, Dinas Sosial Karawang (2023)

Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal validasi data, pelatihan pelaksana, dan komunikasi lintas sektor. Ini diperlukan untuk mencapai sasaran program secara adil dan efisien.

Faktor Penghambat Implementasi

Terlepas dari berbagai kesulitan yang muncul di lapangan, kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem terus dilaksanakan di Karawang. Salah satu kendala utama adalah data penerima bantuan yang tidak akurat, yang merupakan dasar penyaluran program. Banyak masyarakat miskin tidak terdaftar sebagai penerima manfaat karena kurangnya proses verifikasi dan pembaruan data. Sebaliknya, masyarakat yang lebih mampu mendapatkan bantuan.

Selain itu, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan kendala. Banyak pelaksana program desa tidak memahami tata kelola program sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan lebih bersifat administratif dan tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang substansi kebijakan. Ini membuat pelaksanaan tidak efektif di setiap wilayah.

Koordinasi antarinstansi pelaksana belum optimal. Forum seperti TKPKD telah dibuat, tetapi belum digunakan dengan baik untuk menggabungkan berbagai program dari OPD terkait. Masih banyak tumpang tindih program dan kurangnya komunikasi petugas lintas sektor, yang mengakibatkan distribusi sumber daya dan intervensi kebijakan yang tidak efisien.

Kegiatan monitoring dan evaluasi program juga dihambat oleh keterbatasan anggaran operasional di tingkat desa. Karena terbatasnya dana untuk logistik dan transportasi, pelaksana lapangan mengalami kesulitan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, sosialisasi kebijakan, dan pendampingan usaha.

Faktor tambahan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pemerintah. Banyak masyarakat tidak tahu cara mendaftar untuk bantuan, jenis program apa yang tersedia, dan hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat. Tidak adanya sosialisasi dari pelaksana program di tingkat desa, yang bergantung pada informasi dari mulut ke mulut, memperparah hal ini.

Tabel 4.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Penghambat	Dampak di Lapangan
Data tidak akurat	Bantuan tidak tepat sasaran
SDM pelaksana terbatas	Pelaksanaan bersifat administratif semata
Koordinasi lintas sektor lemah	Program tumpang tindih dan komunikasi terhambat
Anggaran operasional terbatas	Minimnya monitoring dan sosialisasi kebijakan
Literasi masyarakat rendah	Rendahnya partisipasi dan pemahaman terhadap program

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Terstruktur, Penelitian Lapangan (2024)

Efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi tidak proporsional karena berbagai tantangan tersebut. Desa-desa tertentu memiliki kemampuan untuk menjalankan program dengan cukup baik, tetapi desa-desa lain masih tertinggal dalam hal implementasi dan pencapaian target. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan yang fleksibel saat merancang kebijakan di tingkat daerah.

Faktor Pendukung Implementasi

Meskipun terdapat berbagai hambatan, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang juga didukung oleh sejumlah faktor yang memperkuat pelaksanaan di lapangan. Salah satu faktor utamanya adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, khususnya Bappeda dan perangkat daerah lainnya, dalam memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan strategis, pengalokasian anggaran khusus, dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah bukti komitmen ini. Forum ini berfungsi sebagai alat penting untuk membantu komunikasi antarinstansi dan membangun sinergi antara program pusat dan daerah yang memiliki tujuan yang sama.

Selain itu, sumber daya yang tersedia dari berbagai sumber, seperti APBD, APBN, Dana Desa, dan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang, berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk pelatihan kerja, bantuan modal kepada UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, dan penghargaan bagi pendamping lapangan.

Keberlanjutan program juga didorong oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam program pelatihan dan pemberdayaan. Beberapa desa telah membantu warganya menjadi mandiri secara ekonomi dengan memberikan pelatihan kerajinan, manajemen warung, dan pertanian organik berskala kecil.

Beberapa desa juga mulai menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan program dan melaporkannya. Misalnya, aplikasi pelaporan online dan grup komunikasi WhatsApp antar perangkat desa memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat, transparan, dan tercatat.

Tabel 4.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor Pendukung	Dampak di Lapangan
Komitmen pemerintah daerah	Penyusunan dokumen strategis dan alokasi anggaran
Forum TKPKD aktif	Koordinasi lintas sektor berjalan lebih sinergis
Pendanaan multisumber	Memungkinkan program menjangkau lebih banyak sasaran
Partisipasi masyarakat tinggi	Mendorong keberlanjutan program dan kemandirian
Inovasi teknologi informasi	Mempercepat pelaporan dan pengawasan program

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Terstruktur, Penelitian Lapangan (2024)

Peluang keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem semakin besar karena faktor pendukung tersebut. Namun demikian, diperlukan perbaikan berkelanjutan dan evaluasi berbasis data untuk memastikan bahwa setiap intervensi program benar-benar berdampak secara signifikan pada penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem.

4. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa berbagai program intervensi, termasuk bantuan sosial tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro, telah digunakan untuk menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Kebijakan belum diimplementasikan secara optimal di tingkat desa, meskipun sudah tersedia dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tantangan paling penting adalah ketidakakuratan data penerima manfaat; sejumlah besar penduduk yang sangat miskin tidak terdaftar secara resmi, sementara beberapa penerima bantuan berasal dari kelompok ekonomi yang lebih mampu. Proses implementasi menjadi lebih sulit karena keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang buruk, dan keterbatasan teknis pelaksana. Selain itu, tidak ada mekanisme pendampingan berkelanjutan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, hasilnya tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan jangka panjang. Proses implementasi menjadi lebih sulit karena keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang buruk, dan keterbatasan teknis pelaksana. Selain itu, tidak ada mekanisme pendampingan berkelanjutan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, hasilnya tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan jangka panjang.

Sebaliknya, ada sejumlah faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor melalui forum TKPKD, ketersediaan dana dari APBN, APBD, dan CSR perusahaan, dan beberapa desa yang memulai inisiatif sendiri untuk memperbarui data warga miskin. Meskipun upaya ini belum mencapai hasil yang sama di seluruh wilayah, hal ini menunjukkan bahwa ada potensi yang bagus yang dapat ditingkatkan. Selain itu, meskipun masih terbatas, masyarakat mulai terlibat dalam program pelatihan dan kegiatan ekonomi lokal.

5. SARAN

Saran dalam pengentasan kemiskinan ekstrem mulai diterapkan di masa depan, fokusnya harus pada sistem pendataan yang lebih akurat dan inklusif, peningkatan kemampuan pelaksana kebijakan di tingkat desa, dan peningkatan koordinasi antarorganisasi untuk menghindari program menjadi duplikat atau terpisah. Agar kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih baik dan mencapai sasaran yang tepat, pendekatan yang lebih adaptif, terlibat, dan berbasis data sangat diperlukan. Oleh karena itu, tujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dapat dicapai dengan cara yang lebih masuk akal dan dapat diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anisyah, D., & Agustina, I. F. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Umsida Preprints Server, 3–10.
- [2] Azizah, T. N., & Agustina, I. F. (2023). Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian. Umsida Preprints Server, 1–12.
- [3] Hamdy, M., Rustandi, H., & Suhartini, V. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 87–96.
- [4] Melik, N., Vestikowati, E., & Yuliani, D. (2022). Peran Kader Posyandu Dalam Pencegahan Stunting di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Repository Unigal, 1–10.
- [5] Mitra. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah. Jurnal Universitas Hang Tuah Pekanbaru, 3–13.
- [6] Nugraheni, N., & Malik, A. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Mencegah Kasus Stunting di Kelurahan Ngijo Kota Semarang. Lifelong Education Journal, 1–10.
- [7] Regita, F. A., & Prathama, A. (2023, April 1). Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan. Sjias, hal. 28–41.
- [8] Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Rustianingsih, E. (2023). Tingkat Literasi Kesehatan Kader Posyandu dalam Pencegahan Prevalensi Stunting di Desa Tambak Kalisogo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2–15.
- [9] Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Jurnal Online Unesa, 2–12.
- [10] Sukmana, H., & Putri, F. F. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Umsida Preprints Server, 224–235.